



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN
SUB UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **VARIAL ADHI PUTRA**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **202483**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.666.866.767**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1397 m2/600 m2 di KOTA PALEMBANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 19994 m2 di TANJUNG JABUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1500 m2/500 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 1.360.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 126.5 m2/83 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 177.586.767
5. Tanah Seluas 19994 m2 di TANJUNG JABUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
6. Tanah Seluas 271 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 144.280.000
7. Tanah Seluas 500 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
8. Tanah Seluas 1000 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/200 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 185.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI



Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 528.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 3.011.466

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 4.382.878.233

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.382.878.233

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **2 September 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.